



Dinamika :

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTEK - UNIVERSITAS CALW
Berkolaborasi dengan
INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION (IAPPA)

ISSN: 2356-3360
e-ISSN: 2614-3045

VOLUME 00 | NOMOR 00 | BULAN | TAHUN 2022 | HAL. 0-00

EDITORIAL TEAM

Ketua Dewan Redaksi

1. [Ahmad Juliarso](#), Universitas Galuh, Indonesia

Editor Bagian

1. [Bevaola Kusumasari](#), Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2. [Faizal Aco](#), Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia
3. [Rifki Agung Kusuma](#), Universitas Galuh, Indonesia
4. [Muhammad Khozin](#), Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
5. [Dini Turipanam Alamanda](#), Universitas Garut, Indonesia
6. [Etih Henriyani](#), Universitas Galuh, Indonesia
7. [Eet Saeful Hidayat](#), Universitas Galuh, Indonesia

















DAFTAR ISI

Vol 10, No 1 (2023)

Dinamika

DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i1>

Daftar Isi

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI DAMPAK SAMPAH DI LINGKUNGAN PESISIR MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DESA JURU SEBERANG)	PDF 1-15
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.8940  Abstract views : 143 times Agustari Agustari	
EFEKTIVITAS PROGRAM PELESTARIAN PAYUNG GEULIS DI DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA	PDF 16-24
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.9175  Abstract views : 78 times Siti Paridah Sundari, Ani Heryani, Andi Andi	
KETERLIBATAN KARANG TARUNA DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN	PDF 25-33
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.9373  Abstract views : 43 times Pebriyansah Saputra, Kariena Febrianting	
DAMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI "MOOCs" DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0	PDF 34-43
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.9793  Abstract views : 60 times Alfriansa Agustina, Farida Nur Aini, Ranjani Ranjani	
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR DESA PATALAN KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN PROFESIONALISME	PDF 44-53
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.9945  Abstract views : 106 times Imam Sucahyo, Renny Chandradewi Puspitarini, Maulidatul Rohma	
EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG	PDF 54-62
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.10122  Abstract views : 64 times Tesa Ariska Sari, Hanny Purnamasari, Indra Aditya	
STRATEGI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG	PDF 63-74
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.10158  Abstract views : 121 times Engkus Engkus, Della Nur Islami, Rifki Agung Kusuma Putra	
STUDI DESKRIPTIF TENTANG EFEKTIVITAS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PEMERINTAH KAMPUNG DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG (DPMK) KABUPATEN BIAK NUMFOR	PDF 75-92
 DOI : 10.25157/dak.v10i1.10202  Abstract views : 25 times Rijal Rijal, D Rudolf Leiwakabessy	

<p>KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA SUKAMAJU DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUKIT SAMPALAN ASRI BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10386</p> <p> Abstract views : 109 times</p> <p>Irfan Nursetiawan, Budi Supriyatno</p>	<p>PDF 93-107</p>
<p>PENGARUH STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KARANGMULYA (Studi Kasus di Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut)</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10207</p> <p> Abstract views : 40 times</p> <p>Edi Tito, Mulyaningsih Mulyaningsih, Aceng Ulumudin</p>	<p>PDF 108-115</p>
<p>KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI JALUR SELF DECLARE (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIAMIS)</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10358</p> <p> Abstract views : 74 times</p> <p>Rida Nurfarida Rahmat, Etih Henriyani, Ahmad Juliarso</p>	<p>PDF 116-125</p>
<p>ANALISA DESKRIPTIF PENANGANAN PENGADUAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10363</p> <p> Abstract views : 52 times</p> <p>Kristian Widya Wicaksono, Rima Rahmawati</p>	<p>PDF 126-138</p>
<p>ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS DANA DESA</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10365</p> <p> Abstract views : 58 times</p> <p>Rd. Ade Purnawan, Nurbudiwati Nurbudiwati, Rizky Bangga Prayuda, Adji Abdul d Wahi</p>	<p>PDF 139-146</p>
<p>IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN UU HPP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KABUPATEN GARUT</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10186</p> <p> Abstract views : 196 times</p> <p>Azka Ratu Aulia, Lina Nurlaela, Kurnaeli Kurnaeli</p>	<p>PDF 147-158</p>
<p>STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN IZIN MINIMARKET</p> <p> DOI : 10.25157/dak.v10i1.10367</p> <p> Abstract views : 58 times</p> <p>Nurbudiwati Nurbudiwati, Jajang Suhendar, Rd. Ade Purnawan, Asep Isma A</p>	<p>PDF 159-170</p>

STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN IZIN MINIMARKET

Nurbudiwati^{1*}, Jajang Suhendar², Rd. Ade Purnawan³, Asep Isma A⁴
^{1,2,3,4} Universitas Garut, Garut, Indonesia

*Korespondensi: Nurbudiwati@fisip.uniga.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan pengelolaan izin minimarket di Kabupaten Garut memiliki banyak permasalahan antara lain dalam pelaksanaan pemberian izin jarak minimarket yang terlalu dekat, pelaksanaan pemberian izin jam operasional melebihi waktu yang ditetapkan dan kurangnya pengawasan dalam operasional pengelolaan izin minimarket. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan izin minimarket, perlu strategi yang tepat agar tercipta bahan pertimbangan bagi kantor DPMPT dalam pengelolaan izin minimarket yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder dengan Time Series Analysis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Instrumen yang digunakan adalah pedoman pengamatan dan kamera. Selanjutnya, metode AHP sebagai teknik analisis dalam menyelesaikan permasalahan dengan alat analisis Expert Choice 2011 untuk membantu pemilihan alternatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa alternatif yakni sosialisasi, kebijakan, dan kerja sama. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software expertchoice, diketahui bahwa alternatif yang terpilih sebagai strategi optimalisasi pengelolaan izin minimarket adalah alternatif kebijakan dengan jumlah nilai 0,356 dan nilai konsistensi 0,00 sehingga dapat dikatakan konsisten, karena kurang dari 0,1. Kemudian, temuan berdasarkan analisis hierarki proses dalam penelitian ini yakni: kriteria pengelolaan izin minimarket menjadi kriteria yang paling penting, alternatif yang menjadi peringkat pertama yaitu kebijakan dengan nilai paling tertinggi, alternatif kerja sama menjadi peringkat kedua, dan alternatif dengan peringkat ketiga yaitu sosialisasi.

Kata Kunci: Strategi Optimalisasi, Pengelolaan, Izin Mini Market, Analisis Hirarki Proses

ABSTRACT

The implementation of managing minimarket permits in Garut Regency has many problems, including in the implementation of granting permits for minimarkets that are too close, the implementation of granting permits for operating hours exceeding the stipulated time and the lack of supervision in operating minimarket permit management. This study aims to examine the management of minimarket permits, the right strategy is needed to create material for consideration for the DPMPT office in better management of minimarket permits. This study uses qualitative methods, the source of the data obtained comes from primary and secondary data with Time Series Analysis. Data collection in this study was carried out by means of observation, interviews, and literature study. The instruments used are observation guides and cameras. Furthermore, the AHP method as an analytical technique in solving problems with the 2011 Expert Choice analysis tool to help choose alternatives. This research produced several alternatives, namely socialization, policy, and cooperation. Based on the results of data processing using

expertchoice software, it is known that the alternative chosen as a strategy for optimizing minimarket permit management is an alternative policy with a total value of 0.356 and a consistency value of 0.00 so that it can be said to be consistent, because it is less than 0.1. Then, the findings based on the hierarchical process analysis in this study are: the criteria for managing minimarket permits are the most important criteria, the first ranked alternative is the policy with the highest value, the alternative for cooperation is ranked second, and the third ranked alternative is socialization.

Keywords: *Optimization Strategy, Management, Mini Market Permit, Process Hierarchy Analysis*

A. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, sistem usaha waralaba hadir sebagai usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini terus meningkat dengan berbagai jenis usaha baru yang tersebar di seluruh dunia. Usaha waralaba ini juga berkembang dalam bentuk usaha retail yang mana tanggapan dari pasar sangat baik.

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia maju sangat pesat, maka pemerintah Indonesia perlu kehati-hatian dalam pemberian izin operasional minimarket, sehubungan banyaknya jenis usaha pasar tradisional ataupun pasar konvensional yang jika tidak di atur maka dikhawatirkan terjadinya saling berbenturan dan akan menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat.

Di Kabupaten Garut usaha jenis waralaba yang saat ini berkembang dengan pesat yaitu jenis usaha retail berupa toko modern berbentuk minimarket antara lain Yomart, Alfamart, Alfamidi dan Indomaret yang ada hampir di semua jalan besar di Kabupaten Garut bahkan sudah masuk kedalam jalan-jalan perumahan warga. Jumlah

minimarket di Kabupaten Garut sampai Tahun 2021 ada sebanyak 328 minimarket. Dalam memberikan izin pendirian minimarket di Kabupaten Garut tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada pasal (13) tentang jarak yang harus dipenuhi sebagai berikut : "Pasal 13":

1. Pengaturan jarak antara pusat perbelanjaan, toko swalayan dan Pasar rakyat yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu a. "Minimarket:, Jarak pendirian minimarket dengan pasar rakyat :
 - 1) Berjarak kurang lebih 200 m dari pasar rakyat yang memiliki skala pelayanan kecamatan;
 - 2) Berjarak minimal kurang lebih 250 m dari pasar rakyat skala pelayanan kecamatan.
 - 3) Berjarak minimal kurang lebih 300 m dari pasar rakyat skala pelayanan yang memiliki skala pelayanan Desa..
2. Jarak pendirian minimarket dengan keberadaan toko / warung atau usaha sejenis yang sifanya mandiri berjarak minimal kurang lebih 100 m dari

toko sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 100 m memberikan persetujuan tertulis di atas materai; dan

3. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan (perumahan) dengan luas gerai 200 m berjarak kurang lebih 500 m dari pasar rakyat dan 250 m dari toko usaha sejenis.
4. Supermarket dan departement store berjarak kurang lebih 1.500 m dari pasar rakyat yang terletak dari pinggir jalan kolektor atau arteri;
5. Hypermarket dan perkulakan berjarak kurang lebih 2.500 m dari pasar rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka (1) dihitung mulai dari titik terluar pasar. Penentuan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan :

1. Tingkat Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir
2. Potensi daerah setempat
3. Aksesibilitas Wilayah (arus lalu lintas)
4. Dukungan keamanan dan ketersediaan insfrastruktur
5. Perkembangan pemulimam baru
6. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan atau
7. Jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Untuk waktu pelaksanaan pelayanan mini market yang diperbolehkan oleh pemerintah Kabupaten Garut seperti

tertuang dalam pasal 25 Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2016 Pasal 25, yaitu :

1. Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sebagai berikut
 - a. Untuk hari senin sampai hari jum”at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. Untuk hari sabtu dan minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
2. Untuk hari besar kaagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 WIB.

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa jalan yang ada lokasi minimarketnya antara lain jalan rsu, jalan cimanuk, jalan pembangunan, jalan maktal dan jalan leuwidaun serta jalan ahmad yani dapat terlihat bahwa penentuan jarak dan waktu pelaksanaan pelayanan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Misalnya seperti yang terjadi di jalan cimanuk antara minimarket alfamart dan minimarket indomart hanya berjarak kurang dari 20 meter dan di sekitarnya terlihat banyak toko konvensional hal ini menjadi masalah karena peraturan mengharuskan jarak antar toko sejenis haruslah minimal sejauh 100 meter. Seperti gambar berikut;



Gambar : Minimarket di Pedes Jalan Cimanuk

Sangat pesatnya pertumbuhan minimarket di Kabupaten Garut memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, Dampak positif bagi masyarakat menjadikan lebih banyak alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari hadirnya minimarket membuat warung-warung konvensional mulai tergantikan dengan banyaknya minimarket terlebih dengan segala fasilitas yang tersedia di minimarket. Sudah tugas pemerintah dalam memberikan persaingan sehat dalam perdagangan terlebih dampak bagi pada perekonomian bagi warung-warung kecil oleh hadirnya minimarket tersebut, apabila melihat jumlah minimarket di Kabupaten Garut yang mencapai 228 toko yang hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut menjadi pertanyaan apakah tidak membahayakan warung-warung konvensional. Di dalam era yang sangat dinamis perlulah suatu kebijakan yang bisa membuat kesejahteraan merata pada masyarakat terutama kalangan bawah, dengan maraknya pendirian minimarket ada rasa khawatir yang sangat besar dari pelaku usaha warung konvensional yang hanya bermodalkan modal pribadi dan bersifat milik pribadi, sedangkan retail minimarket didanai oleh modal yang sangat besar dan badan usaha yang besar berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tentunya dalam pelaksanaan operasional usahanya berjalan lancar, melihat hal ini apakah dengan pemberian kebijakan izin telah tepat.

Untuk optimalisasi manajemen izin minimarket tentu. membutuhkan suatu strategi yang tepat untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat

pada masyarakat. Strategi digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Strategi juga digunakan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Pada penelitian ini, metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) digunakan untuk memilih strategi yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan izin minimarket

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Administrasi Negara

Administrasi Negara sendiri dalam pembicaraannya menonjolkan kepentingan umum. Administrasi Negara adalah siklus dimana aset publik dan tenaga kerja dikoordinasikan dan disusun untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pilihan dalam strategi terbuka dengan memanfaatkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diarahkan untuk mengawasi kegiatan publik (Marliani, 2018). Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* yang memiliki arti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Istilah mengenai administrasi bermula dari bahasa latin *administrare* yang berarti pekerjaan pemerintahan. R.D.H. Kusumaatmadja menjelaskan mengenai administrasi dalam kehidupan memiliki dua implikasi. Pertama, dari perspektif terbatas, administrasi adalah tindakan menyusun, mencatat dalam setiap gerakan atau organisasi. Kemudian, dari perspektif yang luas, administrasi merupakan gerakan pencapaian suatu tujuan berdasarkan perencanaan. Administrasi memiliki ciri kolaborasi umum antara beberapa orang dalam organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

a. Manajemen Publik

Manajemen publik atau bisa juga disebut pemerintahan para eksekutif, secara keseluruhan diartikan sebagai usaha

administrasi dalam memenuhi kebutuhan publik dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang mudah diakses. Komponen administrasi sampai saat ini menjadi komponen penting dalam organisasi, seperti organisasi pemerintah (Siti Maryam, 2017).

b. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Kerangka kerja data intuitif yang memberikan data, menampilkan, dan mengendalikan informasi disebut sebagai Sistem Pendukung Keputusan atau SPK. Menurut Dadan Umar Dahani mengenai ide SPK bermula pada pertengahan tahun 1970 oleh seorang Michael S. Scott Morton yang memiliki pemahaman bahwa SPK adalah sesuatu sistem berbasis computer yang diperuntukan bagi pengambil keputusan dalam menggunakan informasi serta model tertentu guna mencari solusi dari berbagai permasalahan yang tidak terstruktur (Alter, 2002).

c. MCDM (*Multi-Criteria Decision Making*)

Model Pengambilan Keputusan Multi Kriteria (MCDM) adalah metode untuk mengevaluasi dan membuat keputusan/ pilihan alternatif terbaik guna memilih solusi yang sempurna. Metode ini melibatkan model penelitian yang mempertimbangkan masalah dalam pengambilan keputusan diantara kriteria. MCDM digunakan berdasarkan kriteria masalah, untuk memilih alternatif yang sesuai dengan kebutuhan.

d. AHP (*Analisis Hirarki Proses*)

Metode AHP menjadi metode yang digunakan dalam penelitian. AHP (*Analisis Hirarki Proses*) adalah siklus untuk memikirkan masalah secara umum dengan melihat hubungan dari bagian masalah yang berbeda menggunakan sistem progresif. Kehadiran sistem progresif memungkinkan

untuk memisahkan isu-isu yang membingungkan atau tidak terstruktur ke dalam sub-isu, kemudian mengaturnya ke dalam berbagai struktur berjenjang (Kusrini, 2007).

e. Pengertian Minimarket

Minimarket adalah toko atau swalayan kecil yang menjual sebagian barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh konsumen dengan luasan radius sales area antara 100 hingga 1000 m² (Sujana, 2005). Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/MDAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 menyatakan bahwa waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

f. Strategi Optimalisasi

Menurut Tjiptono dalam Sari (2021) istilah mengenai strategi berawal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang mengandung arti seni atau ilmu untuk mencapai suatu tujuan. Strategi di artikan juga sebagai cara yang digunakan dalam pencapaian tujuan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Strategi digunakan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi atau hendak terjadi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder, yang relevan untuk menjawab

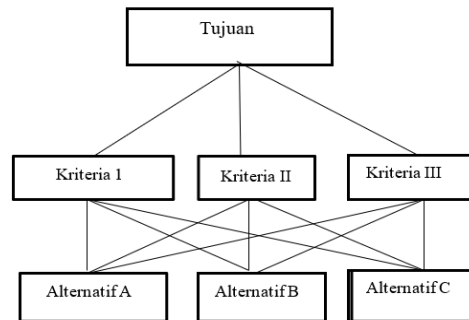
pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplorasi. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pemilihan alternatif. Menurut Yusuf dalam Riyandi et al., (2021) penelitian eksplorasi adalah suatu penelitian yang menggunakan konsep penelitian dengan jangkauan konseptual dalam ruang lingkup penelitiannya. Konsep yang matang menjadi prihal penting dalam penelitian eksplorasi. Kemudian berdasarkan waktu penelitian, peneliti menggunakan *Time Series Analysis* atau melibatkan analisis urutan waktu. *Time Series Analysis* adalah metode analisis yang di gunakan dalam penelitian dengan cara melihat atau mengamati kejadian berdasarkan pada waktu tertentu (Hamilton, 2020). Strategi yang digunakan sebagai upaya pengumpulan data yakni dengan cara pengamatan secara langsung. Kemudian, sumber primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan. Sumber data primer diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, kemudian sumber data sekunder diperoleh langsung berdasarkan studi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan 2 macam strategi dalam pengumpulan data, yaitu: Studi Lapangan dan Studi Pustaka. Menurut Hakim & Rosini (2018) Studi Lapangan adalah cara mendapatkan data dengan cara langsung mencari dilapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Cara tersebut guna mengumpulkan data-data mengenai mini market di Kabupaten Garut. Studi pustaka adalah tahap penelitian dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Dalam suatu penelitian, studi pustaka yakni melakukan

penyusunan atau klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Kemudian, peneliti berupaya untuk mencari sumber data yang lebih *komprehensif* mengenai peraturan dan memperoleh referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Menurut Gulo dalam Anufia & Alhamid (2019) Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner, kemudian kamera yang digunakan sebagai alat dokumentasi penelitian. Analisis adalah suatu proses olah data, yang selanjutnya data disajikan dalam sebuah pola atau kategori. Guna menganalisis data secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode AHP sebagai teknik analisis dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun prinsip yang digunakan adalah dekomposisi, perbandingan penilaian, sintesis prioritas dan konsistensi. AHP adalah hipotesis perkiraan keseluruhan yang berguna sebagai proporsi dalam perbandingan berpasangan. Menurut Tominanto dalam Narti et al., (2019) AHP adalah sebuah teknik untuk memisahkan masalah yang membingungkan dalam keadaan yang tak beraturan menjadi bagian-bagiannya.

Selanjutnya, menghubungkan bagian ini ke dalam jenis rencana perubahan, kemudian menggabungkan keputusan untuk variabel mana yang memiliki kebutuhan paling tinggi yang akan memengaruhi tujuan keadaan. Kemudian, AHP tak hanya membantu individu dalam memilih pilihan yang tepat. Namun, AHP juga dapat

memberikan pertimbangan/alasan pilihan yang utuh menjadi bagian bagian yang jelas. Prinsip prinsip yang digunakan permasalahan yang di gambarkan dalam dalam AHP, yakni: bentuk struktur permasalahan. Adapun

- 1) Penguraian Menguraikan suatu permasalahan AHP sebagai berikut :



Gambar : Struktur Hirarki AHP

- 2) Penilaian Perbandingan susun sebagai jaringan korelasi
 Lakukan evaluasi terhadap berpasangan.
 signifikansi umum dari dua komponen dan

Tabel : Matriks Perbandingan Berpasangan

	A1	A2	A3
A1	1		
A2		1	
A3			1

- 3) Sintesis Prioritas spesialis dan individu-individu yang terlibat
 Memutuskan Kebutuhan komponen erat dalam navigasi, baik secara langsung tindakan dapat dilihat sebagai (percakapan) atau dengan implikasi bobot/komitmen komponen tersebut untuk (survei). Berikut ini merupakan tabel skala alasan arah independen. Kebutuhan ini perbandingan :
 diselesaikan berdasarkan perspektif para

Tabel : Skala Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lainnya	Pengalaman dan Penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lain.
5	Elemen yang satu lebih penting dari pada elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian yang sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lain.
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada elemen yang lainnya	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.
9	Satu elemen mutlak penting dari pada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan i.	

4) *Consistency*

Consistency merupakan batasan nilai yang menjadi validasi perhitungan. *Consistency* memiliki rumus *Rasio Consistency (CR)*, yakni:

$$CI = \frac{\lambda \text{ maksimum} - n}{n - 1}$$

Adapun yang diukur dalam menggunakan metode AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Nilai konsistensi yang ditentukan bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang mendekati valid atau mencapai yang sempurna, dengan meminimalisir kesalahan. Adapun nilainya, harus kurang dari atau sama dengan 0,1. Penelitian ini menggunakan alat analisis Expert Choice (EC) 2011. Expert Choice adalah sebuah program *software* yang dapat dimanfaatkan sebagai perangkat untuk membantu para kepala atau pimpinan dalam mengambil keputusan. Expert Choice menawarkan beberapa keuntungan, mulai dari memberikan informasi standar, dan beberapa keputusan elektif, hingga memutuskan tujuan. Expert Choice mudah digunakan dengan titik koneksi langsung. Kelebihan Expert Choice lainnya yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan kuantitatif dan subjektif

dengan tujuan agar hasilnya masuk akal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi optimalisasi manajemen ijin minimareket menjadi salah satu upaya, yang dijadikan sebagai faktor pendorong dalam memaksimalkan persaingan usaha sesara sehat. Tujuan optimalisasi manajemen ijin minimareket adalah persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha dengan mengkaji mengenai perijinan minimarket, jarak antara minimarket dengan warung konvensional dan jam operasioan minimarket berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Garut. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi pelaksanaan manajemen minimareket adalah agar para pelaku usaha dapat bersaing dengan sehat.

1. Analisis Hierarki Proses

a. Penetapan Elemen Kriteria dan Alternatif

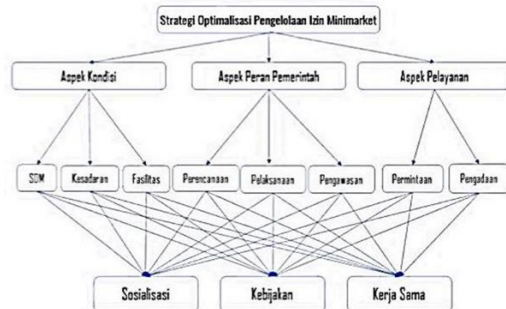
Penetapan elemen atas kriteria, subkriteria, dan alternatif berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan pemilihan elemen, perlu adanya penyusunan kriteria, subkriteria dan alternatif sebagai upaya pemilihan startegi optimalisasi manajemen ijin minimareket. Berikut ini tabel kriteria, subkriteria, dan alternatif :

Tabel : Kriteria, Subkriteria, dan Alternatif

No	Kriteria	Subkriteria	Alternatif		
1	Aspek Kondisi	Sumber Daya Manusia	Sosialisasi	Kebijakan	Kerja Sama
		Kesadaran			
		Fasilitas			
2	Aspek Peran Pemerintah	Perencanaan			
		Pelaksanaan			

Sumber: dibuat oleh peneliti

Berdasarkan tabel atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 3 kriteria yaitu aspek kondisi, aspek peran pemerintah, dan aspek pelayanan. Kemudian, penelitian ini menggunakan 8 subkriteria yakni sumber daya manusia, kesadaran, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, permintaan, dan pengadaan. Dengan menggunakan 3 alternatif yaitu sosialisasi, kebijakan, dan kerja sama. Setelah membuat tabel elemen kriteria, subkriteria, dan alternatif, dilanjutkan membuat model hierarki. Berikut ini adalah gambar model hirarki strategi optimalisasi manajemen ijin Minimarket:



Gambar : Model Hirarki Strategi Optimalisasi Tera Ulang

Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami struktur analisis masalah. Dengan solusi atau tujuan yang terletak paling atas, kemudian di ikuti dengan kriteria utama, subkriteria, dan alternatif. Struktur masalah penelitian yang telah disusun merupakan dasar dalam penyusunan kuesioner dan pengolahan data. Berikut ini merupakan gambar hirarki penelitian menggunakan metode AHP.

1) Matrik Berpasangan Terhadap Kriteria, Subkriteria, Dan Alternatif Matrik berpasangan ini dibutuhkan untuk pengisian kuesioner yang akan ditujukan pada 5 responden yaitu Kpala DISPERINDAG ESDM Kabupaten Garut, Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAD ESDM Kabupaten Garut, Karyawan Minimarket, Pemilik Toko Konvensional, Masyarakat Umum. Membandingkan strategi optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian izin minimarket dengan masing-masing kriteria, subkriteria, dan alternatif.

- 2) Hasil Alternatif Terpilih dari Pengolahan Matrik Perbandingan Berpasangan
Pemilihan strategi alternatif telah dilakukan oleh peneliti. Dengan menggunakan metode AHP, dan dibantu *software expert choice* dalam pengolahan datanya. Berikut ini gambar hasil Alternatif Terpilih dari Pengolahan Matrik Perbandingan Berpasangan pemilihan strategi optimalisasi retribusi tera ulang :



Gambar 4.31 Nilai Alternatif Terpilih
Sumber: Hasil olah data expert choice

Berdasarkan grafik gambar diatas, dapat diketahui bahwa nilai konsistensi 0,00 sehingga nilai tersebut bisa dikatakan konsisten karena kurang dari 0,1. Kemudian, alternatif yang terpilih sebagai strategi optimalisasi pelaksanaan ijin operasionalisasi Minimarket adalah alternatif kebijakan dengan jumlah nilai 0,356. Alternatif kebijakan menjadi pilihan diantara alternatif lain nya. Alternatif kebijakan menjadi solusi yang tepat. Karena, perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan program guna mendukung suatu perencanaan yang baik. Tanpa ada kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan program. Maka penyusunan perencanaan akan cenderung kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang bergerak sesuai dengan

aturan atau standar operasional aturannya. Prihal tersebut di sampaikan oleh Kepala DISPERINDAG ESDM Kabupaten Garut, bahwa:

”Kebijakan menjadi pijakan pemerintah dalam melaksanakan program pemerintahan. Jika rencana tidak di tunjang dengan kebijakan, maka rencana tersebut tidak akan maksimal. Karena, kurangnya dukungan oleh aturan yang ada. Karena pemerintah hanya bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku”. (Hasil Wawancara, 10 April 2022)

Dalam hal ini, pemerintah sangat berhati hati dalam mengambil langkah penyusunan perencanaan. Apabila belum ada kebijakan yang mengatur, pihak pemerintah cenderung memilih merencanakan program yang sudah ada kebijakannya. Alternatif kebijakan tentu menjadi alternatif atau solusi yang tepat untuk menunjang optimalisasi manajemen ijin minimarket.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, ditemukan bahwa temuan yang dihasilkan pada penelitian ini sebenarnya bukan hal baru. Ditemukan temuan pada penelitian ini untuk strategi optimalisasi manajemen ijin operasionalisasi Minimarket di Kabupaten Garut. Temuan berdasarkan analisis hierarki proses pada penelitian ini antara lain: (1) Kriteria pelayanan menjadi kriteria yang paling penting. (2) Alternatif yang menjadi peringkat pertama yaitu kebijakan dengan nilai paling tertinggi dimana merupakan alternatif yang bisa strategi optimalisasi manejememen ijin minimarket. (3) Alternatif kerja sama menjadi peringkat yang kedua dengan nilai dibawah alternatif

kebijakan. (4) Alternatif dengan peringkat yang ketiga yaitu sosialisasi, alternatif ini bisa menjadi cara untuk mengedukasi masyarakat. Alternatif kebijakan menjadi alternatif terpilih sebagai solusi strategi optimalisasi retribusi pelayanan tera ulang kemetrolagian. Dengan jumlah nilai, yakni sejumlah 0,356. Hal ini bisa menjadi acuan untuk strategi optimalisasi manajemen ijin minimarket. Alternatif kebijakan sebagai strategi optimalisasi manajemen ijin minimareket Kabupaten Garut, ditunjang dengan beberapa kelebihan yaitu: sumber daya manusia, fasilitas, perencanaan, pengawasan, dan permintaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hakim, D. R., & Rosini, I. (2018). *Metode Penulisan Ilmiah*.
- Hamilton, J. D. (2020). *Time Series Analysis*.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BeryDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Time+Series+Analysis+&ots=BgyO22bSjk&sig=_gg02NUUSALdTVhs7Jwi4624B1A&redir_esc=y#v=onepage&q=Time Series Analysis&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BeryDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Time+Series+Analysis+&ots=BgyO22bSjk&sig=_gg02NUUSALdTVhs7Jwi4624B1A&redir_esc=y#v=onepage&q=Time+Series+Analysis&f=false)
- Isnaini Rodiyah, (2021) Manajemen Sumber Daya Manusia, Sektor Publi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Jajang Suhendar. (2019). Skripsi : *Evaluas Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Minimarket Di Kabupaten Garut*. Universitas Garur
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76–79.
- Marliani, L. (2018). Metamorfosis Admiistrasi Negara. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 1–7.
- Narti, N., Sriyadi, S., Rahmayani, N., & Syarif, M. (2019). Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah Dengan Metode AHP. *Jurnal Informatika*, 6(1), 143–150.
- Pebrianti, F. (2021). *Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Anggeraja Kab. Enrekang)*.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Riyandi, M., Engkeng, S., & Asrifuddin, A. (2021). Eksplorasi Perilaku Merokok Dan
- Minum Kopi Di Rumah Kopi Billy (Rkb) Pada Masyarakat Di Kota Manado. *Kesmas*, 10(5).
- Sari, K. W. (2021). Strategi Marketing

- Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung Ditengah Krisis Covid-19 (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Marketing Public Relations Hotel Grand Tjokro). *Jurnal Purnama Berazam*, 2(2), 142–152.
- Siregar, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 160–170.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Wibowo, A. W., & Utami, S. (2017). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Investasi di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 22–43.
- Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.